



**STANDAR PELAYANAN  
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN  
PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA**  
UNTUK USAHA NON-UMK, USAHA DENGAN TINGKAT RESIKO MENENGAH TINGGI DAN  
TINGGI

No. Dokumen :

Revisi :

Tgl. Efektif :

Unit Kerja

: Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan A.III

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Fotocopy KTP-el 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan untuk Badan Usaha 4. Fotocopy Pengesahan dari Kemenkumham untuk Badan Usaha 5. Fotocopy BPJS kesehatan dan/atau ketenagakerjaan 6. Fotocopy Bukti Pelunasan PBB 7. Informasi dan gambaran jenis usaha 8. Informasi Penguasaan Tanah (SHM, HGB, HPL, HP, Sewa-Menyewa, dll) 9. Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk KKPR dari Kantor Pertanahan Kab. Buleleng 10. Surat Keabsahan Dokumen 11. Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan - Situasi / Denah lokasi dan titik koordinat - Rencana Tapak Kegiatan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	10 (dua puluh) hari
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan 3. Email : <a href="mailto:dpmpstsp@bulelengkab.go.id">dpmpstsp@bulelengkab.go.id</a> 4. Website : <a href="http://dpmpstsp.bulelengkab.go.id">dpmpstsp.bulelengkab.go.id</a> 5. Telp : (0362) 22063



**STANDAR PELAYANAN  
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN  
PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA  
UNTUK USAHA NON-UMK, USAHA DENGAN TINGKAT RESIKO MENENGAH TINGGI DAN  
TINGGI**

No. Dokumen :

Revisi :

Tgl. Efektif :

<b>B</b>	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja</li> <li>4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung</li> <li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.</li> <li>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara &amp; Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP AP</li> <li>14. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE-PF.01/III/2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Daerah</li> <li>15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029</li> <li>16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi</li> <li>17. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2023</li> <li>18. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> <li>19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Singaraja Tahun 2021-2041</li> <li>20. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah</li> <li>21. Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.5</li> </ol>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Peraturan Perundang-undangan</li> <li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi</li> <li>2. Sekretaris Dinas</li> <li>3. Kepala Dinas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurusan PKKPR yang Nyaman</li> <li>2. Pengurusan PKKPR yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu</li> <li>3. Pengurusan PKKPR yang bebas Calo dan Pungli</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen PKKPR dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Singaraja, 2021  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU KAB. BULELENG**

**I MADE KUTA, S.SOS**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19700710 199203 1 007